

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tingkat elemen terbawah dari struktur pemerintahan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah Desa dengan masyarakat, karena desa adalah unit lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2012).

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan adanya Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dalam rangka pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan khusus untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan. Besarnya alokasi dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa, sehingga perlu adanya landasan hukum sehingga pengelolaan dana dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan pengelolaan dana Desa yang akuntabel, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam teknis pengelolaan keuangan desa, Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang bersih yang bersandarkan pada prinsip *good governance*, yakni partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut tidak hanya diperuntukkan pada pemerintah pusat saja namun pada pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa.

Prinsip partisipatif dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa mencerminkan aspirasi masyarakat. Prinsip

transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, memadai, dapat dimengerti dan dipantau sehingga informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan prinsip akuntabilitas memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang telah memberikan kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka (Ulum dan Sofyani, 2016). Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. (bulelengkab.go.id, 2017).

Dalam membangun kepercayaan masyarakat, maka pemerintah desa harus membangun akuntabilitasnya terhadap pemerintah dan masyarakat. Bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang bersifat formal dapat berupa laporan keuangan. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang efisien, efektif dan ekonomis merupakan bentuk dari prinsip akuntabilitas suatu daerah (Binawati, 2014).

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, sehingga perannya sangat penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan, wajar, dan terukur. Akuntabilitas bukan hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal tetapi merupakan pertanggungjawaban kepada lingkungan organisasi yang meliputi masyarakat, pemerintah dan kepatuhan kepada peraturan (Patton, 1992 dalam Mahayani, 2018).

Peran akuntabilitas sangat penting dalam menunjang kemajuan desa dan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas juga sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengelolaan keuangan Desa yang diharapkan setiap desa dapat mengelola dananya secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yang memberikan hasil bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik seperti penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2014), Wida *et al.* (2017), Makalalag *et al.* (2017) yang menyatakan pengelolaan dana desa telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2017), Asmawati & Basuki (2018), Nenobais (2018), Sholihat *et al.* (2018), Hanafie *et al.* (2019), yang menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa belum akuntabel karena masih banyak kelemahan-kelemahan dalam pengelolaannya.

Inkonsistensi hasil penelitian di atas, memberikan motivasi kepada peneliti untuk meneliti kembali akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berfokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemilihan lokasi penelitian di Desa

Melaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali dikarenakan desa ini merupakan kategori Desa maju pada tahun 2019 dan penerima dana desa terbesar di Kabupaten Jembrana tahun 2019 sebesar Rp 1.825.057.368,-, bahkan jumlahnya meningkat 30,19% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.401.788.000,- dan pada tahun 2020 dinyatakan sebagai Desa mandiri (nusabali.com, 2019).

Besarnya dana Desa tersebut membuat keingintahuan peneliti untuk melihat sejauhmana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Bali. Berdasarkan hal di atas, peneliti mengajukan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jembrana Bali)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Melaya, kecamatan melaya, kabupaten jembrana,bali
- 2) Menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
 - c. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

d. pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2) Bagi akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3) Bagi Instansi

Sebagai masukan khususnya kepada Pemerintah Desa Melaya, Kecamatan Melaya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

